

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perubahan sistem internasional yang berlangsung dinamis dan progresif, ditandai dengan semakin pentingnya pemahaman masyarakat terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya era globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan penjurus dunia secara cepat, informasi dan teknologi komunikasi menjadi suatu komoditas penting yang mampu menembus batas-batas negara tanpa adanya suatu proses seleksi atau pengawasan yang ketat. Zaman yang menjanjikan harapan dan kemungkinan akan terjadinya perubahan sistem global pada struktur masyarakat internasional, menuntut kita untuk terus berpacu dengan waktu. Dalam mengikuti perkembangan teknologi dunia yang berkembang secara pesat dan cepat, pada dasarnya, semua bidang kehidupan masyarakat saat ini dan masa depan akan semakin tergantung pada pentingnya informasi dan komunikasi dunia.

Dari situasi perubahan sistem global dan ketidakstabilan tatanan dunia yang ditandai dominasi politik dan ekonomi negara-negara industri besar, khususnya Amerika Serikat, dan kelompok negara-negara Eropa Barat serta perebutan pengaruh, kawasan Teluk muncul sebagai kekuatan baru yang harus diperhatikan dalam percaturan politik dunia. Kawasan Teluk Persia sebagai sumber minyak dan gas yang dimiliki oleh berbagai negara seperti Iran, Irak, Saudi Arabia, Libya, Uni Emirat

Arab, Kuwait, Qatar dan sebagainya telah memberikan manfaat terhadap berbagai negara di dunia.

Demikian juga dengan negara Iran yang dikenal sebagai negara Islam yang kaya sumber daya alamnya. Didukung dengan keberhasilan sebuah revolusi di negara ini. Tokoh dibalik keberhasilan gemuruhnya revolusi Islam di Iran pada 1979 adalah Ayatullah Khomeini, ulama besar Syiah yang tak gentar menghadapi terjangan peluru dan getirnya pengasingan demi keyakinan di dadanya.

Tidaklah mudah pula untuk mengatakan bahwa revolusi di Iran memiliki persamaan dengan revolusi-revolusi di negara lain yang mana revolusi-revolusi tersebut dilatarbelakangi oleh keambrokan perekonomian yang melanda mereka.

Banyak pengamat yang tidak menyangka bahwa di Iran akan pecah suatu revolusi besar yang tidak dapat disejajarkan dengan Revolusi Perancis, Rusia dan Amerika. Sesuai hal ini, sedikit banyak tentulah timbul dampak baik itu dampak internal atau eksternal terhadap negara Iran. Begitu juga kaitan hubungan Iran dengan negara lain dan bagaimana politik luar negerinya ke Afghanistan selanjutnya.

Dalam hal ini, penulis lebih memfokuskan kepada politik luar negeri negara Iran ke Afganistan, karena diketahui letak geografis Afghanistan berdekatan dengan Iran dan kedua negara ini bersahabat baik. Sehingga menjadikan suatu ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk membahasnya.

Demikianlah hal yang mendorong penulis untuk menetapkan judul "**Politik Luar Negeri Iran ke Afghanistan pasca Rezim Taliban**" sebagai judul penulisan skripsi ini.

B. Latar Belakang Masalah

Daerah Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang paling penting sehingga barang siapa yang menguasainya, maka akan mempunyai kedudukan yang strategis di dunia. Pasca Perang Dunia II, kawasan Timur Tengah muncul sebagai kekuatan baru, dimana Terusan Suez yang menjadi jembatan penghubung antarnegara sebagai kawasan yang sering dilanda konflik, baik regional atau global, kawasan ini menjadi lebih penting, karena memiliki arti yang strategis yang dimungkinkan oleh beberapa alasan. Pertama, Timur Tengah menghubungkan Afrika, Asia dan Eropa. Meliputi daerah darat, laut dan udara. Kedua, menjelang Perang Dunia II, muncul faktor baru yaitu mengenai kekayaan alam yang berupa cadangan minyak yang melimpah.

Salah satu negara yang memiliki posisi strategis di kawasan Timur Tengah adalah Amerika Serikat., yang dikenal sebagai negara "*super power*". Hubungan antara Iran dan Amerika Serikat sebenarnya telah mengalami kemunduran sejak kejatuhan pemerintahan Shah di Iran. Tepatnya setelah kembalinya Khomeini dari pengasingannya di Paris, Perancis. Ia kemudian membentuk Republik Islam Iran, dan bersamaan itu kemudian dikeluarkan kebijakan untuk mengusir ratusan ribu warga Amerika dan Yahudi. Karena sebelumnya, terjadi demo besar-besaran di Iran sepanjang tahun 1970-an. Mereka memprotes Amerika Serikat karena pengaruh Amerika Serikat yang sangat dominan pada masa Shah berkuasa, yang ditandai dengan kehadiran ratusan ribu warga Amerika dan Yahudi, termasuk intelijen dan militer. Mereka menduduki pos-pos strategis. Seorang pejabat Iran bahkan

menyebutkan bahwa Dubes Amerika ketika itu bisa memanggil menteri-menteri Iran kapan saja. Sejak itu, hubungan Iran dengan Amerika Serikat terus memburuk. Kemenangan Revolusi Iran bukan hanya dianggap sebagai kekalahan rezim Shah, tapi juga “kemenangan” atas Amerika. Hal itu kemudian disimbolkan dengan menjadikan bekas Kedubes Amerika di jalan Teleghani, Teheran, sebagai tontonan, sebagai museum sebuah negara super power yang tak berdaya menghadapi Iran.¹

Sedangkan Afghanistan adalah suatu negara kunci untuk masuk ke wilayah yang kaya minyak, karena negara ini berbatasan langsung dengan negara Uni Soviet bagian selatan. Karena letak yang strategis, serta juga sebagai penghubung untuk masuk menuju negara-negara yang kaya akan minyak, menarik minat dari negara-negara baru. Seperti Uni Soviet, Amerika, Inggris, untuk menanamkan pengaruh dan eksistensinya di Afghanistan.

Ibukota Afghanistan, yaitu Kabul, mengalami beberapa peringkat perubahan arus politik. Pada tahun 1960-an, Kabul menjadi sebuah bandar modern yang mengamalkan liberalisme. Dengan adanya dominasi politik Afghanistan oleh *People's Democratic Party of Afghanistan* (PDPA) pada tahun 1978, Kabul berubah corak mengikuti gaya Sosialis Rusia. Kemudian pada tahun 1992-1996, Kabul dikuasai oleh Mujahidin. Tetapi, tentara Mujahidin memutuskan untuk mundur saja

¹ Ikhwaniul Kiram Mashuri, *Nuklir, Pergantian Pemerintah Atau Apa?* (catatan kunjungan sejumlah wartawan Indonesia ke Iran), Februari, 2005.

dari Kabul dengan adanya serangan tentara Taliban. Sejak itu, Kabul dikuasai oleh Taliban.²

Kemudian dengan adanya invasi Amerika Serikat ke Afghanistan yang akhirnya menumbangkan rezim Taliban, Presiden Iran Mohammad Khatami ikut angkat bicara lewat radio di Teheran. Presiden Khatami mengutuk serangan udara pimpinan Amerika Serikat di Afghanistan, dan sekaligus mengutuk Taliban yang katanya menyalah tafsirkan ajaran Islam. Khatami juga menyebut pimpinan Taliban di Kabul sebagai pemimpin kampung, karena Taliban melancarkan aksi kekerasan, perang, dan perdagangan obat bius gelap, atas nama Islam. Sedangkan, yang jadi korban dari serangan pimpinan Amerika Serikat adalah rakyat Afghanistan yang tidak bersalah.³

Sebelumnya, hubungan negara Iran dan Afghanistan mengalami ketegangan. Setelah sekitar 70 ribu tentara Iran, pada bulan Januari 1998 melakukan latihan perang di dekat perbatasan Afghanistan. Hal itu akan lebih mempertegang hubungan kedua negara. Latihan itu dibuka oleh Komandan Pengawal Revolusi Mayjen Yahya Rahim Savafi yang mengatakan latihan ini untuk menguji perlengkapan militer modern dan menerapkan taktik-taktik pertempuran yang canggih.

Latihan udara dan darat itu berpusatkan di sebuah daerah dekat Torbat-e-Jam, sekitar 60 kilometer dari perbatasan Afghanistan. Milisi Taliban, yang menguasai sebagian besar Afghanistan, memperingatkan Iran bahwa latihan tersebut akan

² Mohammad Radzuan Othman, *Afghanistan Sejarah Sebuah Duka*.

³ www.voanews.com/indonesian/Archive/a-2001-10-15-1.cfm?textmode

meningkatkan ketegangan kedua negara. Pihak Taliban tidak akan berdiam diri bila Iran melakukan manuver-manuver yang dapat membahayakan Afghanistan. Latihan ini dilakukan setelah pemerintahan Teheran menuduh milisi Taliban menyandera 11 diplomatnya. Penyanderaan itu sepertinya berkaitan dengan dukungan Iran terhadap pasukan oposisi Afghanistan.⁴

Sehingga memaksa pihak Taliban minta PBB untuk menengahi ketegangannya dengan pemerintah Teheran, terutama masalah diplomat Iran yang hilang. Berkaitan dengan itu Iran lalu meningkatkan pertahanannya disepanjang perbatasan dengan Afghanistan, terutama di jalur perdagangan opium dan heroin dari Afghanistan menuju Eropa.

Pada 22 Desember 2001 lalu, di Kabul, ibukota Afghanistan, digelar acara peralihan kekuasaan dari aliansi utara pimpinan Burhanuddin Rabbani kepada pemerintahan sementara (interim) Afghanistan pimpinan Perdana Menteri (PM) Hamid Karzai. Karzai, dengan 30 anggota kabinetnya mulai resmi menjalankan tugasnya untuk masa waktu enam bulan sesuai kesepakatan Konferensi Bonn (Jerman) yang disponsori PBB awal Desember lalu. Tetapi rupa-rupanya pemerintahan interim PM Hamid Karzai diramalkan akan gagal dan ditolak rakyat Afghanistan karena dia cuma ciptaan Amerika Serikat. Ia malah berniat akan membentuk Front Serikat anti Amerika Serikat yang akan melibatkan Taliban dan kekuatan nasionalis lain melawan pengaruh Amerika Serikat di Afghanistan. Melihat perkembangan politik terbaru di Afghanistan dan ritme perubahan aliansi politik

⁴ www.indonesia.com/bpost/9802/2 In/In4.htm

maupun militer yang begitu cepat di negeri itu selama ini, tampak bahwa perubahan politik terbaru yang mengacu pada Konferensi Bonn tersebut benar-benar merupakan bagian dari rekayasa Amerika Serikat terhadap negeri muslim tersebut. Walaupun dilansir secara besar-besaran dalam pemberitaan, bahwa peristiwa peralihan kekuasaan ini adalah pertama kalinya yang berlangsung damai dalam hampir tiga dekade terakhir.⁵

Washington memuji sikap positif Iran atas Konferensi Bonn yang berhasil membentuk pemerintahan sementara Afghanistan pimpinan Perdana Menteri (PM) Hamid Karzai. Bahkan Iran berjanji pula mengucurkan dana 500 juta dollar AS untuk membantu proyek pembangunan kembali Afghanistan.⁶

Iran, yang secara langsung berbatasan dengan negara Afghanistan disebelah barat juga terkena imbas dari situasi atau konflik yang terjadi di Afghanistan. Kabul menyambut baik dengan gembira revolusi yang telah mencampakkan Amerika. Namun, disisi lain timbul suatu kekhawatiran terhadap gerakan Islam di Afghanistan sehingga menimbulkan “perang dingin” antara kedua rezim. Hal ini berkaitan dengan 2 tema paling penting dalam politik luar negeri Iran pasca revolusi, yaitu internasionalisme dan permusuhan terhadap negara-negara “*super power*”.

Hal ini menjadi menarik bagi penulis untuk meneliti perkembangan hubungan kedua negara antara Iran dan Afghanistan serta bagaimana politik luar negeri Iran ke

⁵ <http://www.uno.de/frieden/afghanistan/talks/agreement.htm>

⁶ Musthafa Abd. Rahman, *Iran Pasca Revolusi (Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konservatif)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, September 2003, hal 180.

Afghanistan terutama setelah invasi Amerika ke Afghanistan dan tergulingnya rezim Taliban.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dikemukakan di atas, maka timbul suatu permasalahan sebagai fokus penelitian dengan pertanyaan :

“Bagaimana politik luar negeri Iran ke Afghanistan pasca rezim Taliban?”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan politik luar negeri Iran ke Afghanistan pada pemerintahan Hamid Karzai sebagai Perdana Menteri sementara (interim) di Afghanistan, setelah tergulingnya pemerintahan Taliban. Selain itu, dalam penyusunan skripsi ini, penulis mencoba agar dapat lebih memahami dan menambah literatur perspektif studi hubungan internasional dalam konteks masalah politik luar negeri serta penerapan teori-teori yang pernah diperoleh selama duduk di bangku kuliah.

Namun yang tidak kalah penting adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Kerangka Dasar Teori

Untuk memahami keputusan politik luar negeri suatu negara cukup banyak teori yang membahasnya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori atau kerangka dasar teori, yaitu proses pengambilan keputusan politik luar negeri. Sebelum menguraikan teori yang dipakai didalam menganalisa permasalahan yang ada, lebih dulu akan disampaikan apa yang disebut teori itu sendiri.

Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan pada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa terjadi, dengan demikian selain di pakai untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar prediksi. Dari pengertian ini secara gamblang teori bisa dikatakan sebagai suatu pandangan atau persepsi mengenai sesuatu yang terjadi dan akan terjadi.⁷

Dalam ilmu hubungan internasional, teori menduduki posisi kunci yakni sebagai alat analisis dan sebagai alat prediksi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi. Penulisan skripsi didasarkan atas kerangka teori politik luar negeri senantiasa dimulai dari kepentingan nasional negara yang melaksanakannya. Dengan demikian pemaparan tentang politik luar negeri juga harus didasarkan pada konsep kepentingan nasional (*national interest*).

Sedangkan disebut dalam kamus hubungan internasional, politik luar negeri diartikan sebagai :

⁷ Mochtar Mas'ood, *Teori dan Metodologi Hubungan Internasional* PAU UGM (Yogyakarta 1988) hal. 121

*A strategy or plan course of action developed by decision makers of a state vis a vis other state or international entities, aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest.*⁸

Konsep *national interest* digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam politik internasional. Namun, seringkali konsep ini dipakai untuk ukuran keberhasilan politik luar negeri suatu negara.⁹

Selain itu, politik luar negeri juga mengandung tindakan yang merupakan bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk mengubah atau mendukung perilaku negara lain. Hal ini menandai dimulainya proses politik internasional.

Lebih sederhana lagi politik luar negeri diartikan sebagai iringan kebijaksanaan disertai rentetan tindakan yang rumit tetapi dinamis, yang ditempuh oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain atau kegiatannya dalam organisasi-organisasi internasional maupun regional.¹⁰

Seperti telah dikemukakan di atas, politik luar negeri senantiasa ditujukan untuk memenuhi *national interestnya*, kepentingan nasional ini dapat melukiskan aspirasi suatu negara secara operasional. Dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijaksanaan yang aktual dan rencana-rencana yang dituju oleh suatu negara.¹¹

Dalam menjalankan hubungan luar negeri dengan negara lain, perubahan politik luar negeri dapat dilihat dari politik luar negerinya. Sedangkan politik poliitik luar

⁸ Jack C.Plano and Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, Halt Rinchart and Winstone Inc, USA 1969.

⁹ Plano *Op Cit*, hal. 391.

¹⁰ Supri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1989.

¹¹ J. Prankel, *International Relations*, Terjemahan Lalia Hasyim, ANS Sungguh Bersaudara, Jakarta 1980, hal 54-55.

negeri didefinisikan sebagai suatu tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, demi memecahkan masalah ataupun mendorong suatu perubahan dalam lingkungan yang mencakup kebijakan (*policy*), perilaku (*attitude*), dan tindakan (*action*) suatu negara untuk negara lain.¹²

Seperti yang diungkapkan oleh K.J. Holsti, output dari kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan, sikap, atau tindakan negara lain.¹³

Menurut Holsti, gagasan kebijakan luar negeri terbagi menjadi empat komponen, mulai dari yang umum hingga yang spesifik, yaitu:¹⁴

1. Orientasi kebijakan luar negeri
2. Peran nasional
3. Tujuan, dan
4. Tindakan

Tingkat keterlibatan suatu negara dalam berbagai bidang isu internasional paling sedikit merupakan suatu ungkapan orientasi umumnya terhadap bagian dunia lain.

¹² K.J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, Erlangga, Jakarta, 1988, hal. 107.

¹³ *Ibid*, hal. 159-160.

¹⁴ *Ibid*, hal. 107.

Dalam membahas permasalahan yang timbul dalam tulisan ini, penulis menggunakan Teori Politik Luar Negeri oleh William D. Coplin dalam Perilaku Pengambilan Keputusan Luar Negeri.

Menurut William D. Coplin, ada tiga jenis keputusan luar negeri, yaitu:¹⁵

- 1) Keputusan-keputusan politik luar negeri yang sifatnya umum,
Kebijakan ini terdiri atas serangkaian keputusan yang diekspresikan melalui pernyataan-pernyataan kebijakan dan tindakan-tindakan langsung.
- 2) Keputusan-keputusan politik luar negeri yang bersifat administratif
Keputusan ini dibuat oleh anggota-anggota birokrasi pemerintah yang bertugas melaksanakan hubungan luar negeri negaranya.
- 3) Keputusan-keputusan politik luar negeri yang bersifat krisis
Keputusan ini merupakan kombinasi dari kedua tipe politik luar negeri yang lain. Keputusan ini bisa berdampak luas terhadap kebijakan umum suatu negara.

Sedangkan Orientasi Politik Luar Negeri oleh Holsti diartikan sebagai sikap atau komitmen suatu negara terhadap strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan domestik dan luar negerinya, serta menanggulangi beberapa ancaman yang berkesinambungan.¹⁶

Dengan mengkaji struktur kekuasaan dan pengaruh serta tindakan unit politik dalam berbagai sistem internasional, Holsti mengidentifikasi paling sedikit ada

¹⁵ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional*, (Suatu Telaah Teoretis) alih bahasa: Drs. Marsedes Marbun, Sinar Baru, Bandung 1992, hal. 32.

¹⁶ *Op Cit*, hal. 108.

tiga orientasi fundamental yang telah diterapkan secara berulang, tanpa menghiraukan konteks sejarah. Orientasi itu adalah:¹⁷

1) Isolasi

Isolasi strategi politik dan militer dinyatakan oleh tingkat keterlibatan yang rendah dalam sebagian besar bidang isu sistem, jumlah transaksi diplomatik dan komersial yang rendah dengan unit politik atau masyarakat lain, dan upaya untuk menutup rapat negeri terhadap berbagai bentuk penetrasi eksternal.

2) Strategi nonblok

Merupakan tipe orientasi kebijakan luar negeri dimana suatu negara yang tidak melibatkan kemampuan militer, dan kadang-kadang dukungan diplomatiknya terhadap tujuan-tujuan negara lain.

3) Pembentukan koalisi dan aliansi

Pemerintah yang berusaha membangun koalisi diplomatik dan aliansi militer yang permanen mengasumsikan bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka, mempertahankan kepentingan mereka, atau menghalangi ancaman yang dirasakan dengan memobilisasikan kemampuan mereka sendiri. Jadi, mereka mengandalkan dan membuat komitmen dengan negara lain yang juga menghadapi masalah luar negeri yang sama, atau secara bersama mereka mencapai tujuan itu.

¹⁷*Op Cit*, hal. 108-109.

Begitu juga jika hal ini dikaitkan dengan Afghanistan dan Iran dimana dalam menjalankan politik luar negerinya dilandasi oleh berbagai kepentingan yang ingin dicapai oleh kedua negara. Disatu pihak ada yang menjadikan kepentingan politik ideologis sebagai faktor penentu dalam hubungannya dengan negara yang dituju. Dan seperti kita ketahui, revolusi Islam di Iran mampu merubah secara fundamental semua segi baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya, sehingga revolusi itu dapat dilihat sebagai suatu revolusi anti imperialisme yang dilakukan penduduk Islam Fundamentalis. Iran sebagai negara yang mempergunakan sistem pemerintahan Islam dalam menjalankan politik luar negerinya mempunyai tujuan yaitu internasionalisme Islam dan mengadakan permusuhan terhadap negara-negara penindas. Wajib hukumnya bagi umat Islam untuk menjadi penolong bagi kaum tertindas dan menjadi musuh bagi kaum penindas. Ulama atau para pemimpin Islam berkewajiban untuk berjuang melawan semua usaha para penindas dalam menegakkan monopoli atas sumber-sumber kekayaan atau mewujudkan usaha yang haram.¹⁸

Dari gambaran teori di atas terlihat bahwa politik internasional merupakan arena perebutan pengaruh yang tereksplisit. Ada pergolakan untuk memperoleh kekuasaan dan kekuatan yang sebesar-besarnya agar berada pada posisi superior atas negara-negara lain guna memenuhi kepentingan nasionalnya melalui politik luar negeri.

¹⁸ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, Terjemahan Muhammad Anis Maulachela, Pustaka Zahra, Jakarta 2002, hal. 40.

F. Hipotesa

Dengan permasalahan dan kerangka teori yang sudah ditetapkan dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut :

1. Iran menyebut Afghanistan adalah sekutu dari Amerika Serikat sejak Afghanistan membentuk aliansi dengan Amerika Serikat.
2. Iran mempunyai persepsi bahwa pemerintahan Hamid Karzai merupakan rekayasa Amerika Serikat dan menyebut negara Afghanistan tidak lebih adalah sebagai “negara boneka” buatan Amerika Serikat.
3. Hubungan diplomasi antara Iran dan Afghanistan menjadi renggang.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi penelitian agar tidak terlalu meluas dan lebih fokus pada inti permasalahan maka pembahasan ditekankan pada politik luar negeri Iran ke Afghanistan dengan membatasi penelitian sejak era pemerintahan Mohammad Khatami ke-2 sampai dengan masa sekarang (2001-2005). Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk tidak mengabaikan kejadian-kejadian waktu lain yang relevan, bila diperlukan.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui studi pustaka (*Library Research*) baik departemen maupun non

departemen. Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah berupa data sekunder yang bersumber dari buku, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, dan literatur-literatur lain yang relevan dengan tema penulisan serta mengakses data dari internet yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas ini.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bagian (bab) yakni sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI IRAN

Pada bab ini diuraikan politik luar negeri Iran serta hubungan Iran dengan negara-negara di kawasan Teluk, hubungan Iran dengan negara Amerika Serikat, serta hubungannya dengan Afghanistan pada era pemerintahan Mohammad Khatami.

BAB III : REZIM AFGHANISTAN PASCA INVASI AMERIKA

Bab ini membahas situasi Afghanistan pasca invasi Amerika Serikat sampai dengan tergulingnya pemerintahan Taliban, serta terbentuknya pemerintahan sementara oleh Amerika Serikat.

BAB IV : KEBIJAKAN LUAR NEGERI IRAN TERHADAP AFGHANISTAN PASCA REZIM TALIBAN

Bab ini menjelaskan tentang pemerintahan pasca Taliban, kebijakan politik luar negeri, serta sikap negara Iran terhadap negara Afghanistan.

BAB V : KESIMPULAN.

Bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.